

PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA TAK TERDUGA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Desir Rohma Dyna¹, Nelly Masnila², Riza Wahyudi³

^{1,2,3}Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: desirrohmadyana@gmail.com, nellymasnila@polsri.ac.id, rizawahyudi70@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the effect of capital expenditures, good and services expenditures, and unexpected expenditures on budget absorption at the government of the district/city in South Sumatera Province. The population in this research are all district/cities in South Sumatera Province which includes 17 district/cities with saturated sampling, the population were used as sample so the sample of this research was 17 district/cities in South Sumatera. The data used in this research is secondary data obtained from the website of the Audit Board of Republik Indonesia with an observation year of 5 years. The analysis data method used in this research was multiple regression analysis method. Based on the results of data processing through the IBM SPSS Statistic Software that had been analyzed, it is concluded that the capital expenditures, good and services expenditures affect budget absorption and unexpected expenditures did not affect budget absorption at the Government of the District/City in South Sumatera Province.

Keywords : Capital Expenditures, Good and Services Expenditures, Unexpected Expenditures on Budget Absorption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja tak terduga terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi pada penelitian yang dilakukan ialah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan total 17 Kabupaten/Kota dan memakai kriteria sampling jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sehingga sampel penelitian ini 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Data yang dipakai pada penelitian yang dilaksanakan ialah data sekunder yang didapat pada situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan tahun amanat yaitu 5 tahun. Metode analisis data yang dipakai pada penelitian yang dilaksanakan ialah metode analisis regresi linear berganda. Didasari dari hasil pengolahan data lewat Software IBM SPSS Statistik yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan jika variabel belanja modal, belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan belanja tak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga, Penyerapan Anggaran

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dari orde baru ke zaman reformasi, memberi kesempatan munculnya pemerintahan sendiri yang diawali dengan pengalihan kewenangan pemerintah pusat ke daerah. Otonomi daerah dilakukan melalui pemberian wewenang di bidang anggaran maupun penerimaan keuangan, baik dari segi administrasi juga dalam hal penggunaan, sebagaimana diatur dalam APBD. Pemerintah daerah menyusun rencana

keuangan setiap tahunnya, tercantum didalam APBD dan disepakati oleh DPRD. Hal ini mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah yang mendukung upaya pembangunan daerah mereka sendiri demi kesejahteraan masyarakat (Huda dan Sumiati, 2019).

Saat ini, negara secara aktif terlibat dalam meningkatkan kesadaran akan peran pemerintah, yang diperlukan untuk memberikan pergerakan yang lebih cepat bagi perekonomian negara (Idrus, 2013). Peran negara dapat dijelaskan dengan meningkatkan potensi wilayah dan pengelolaan tenaga kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tingkat penggunaan anggaran di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting yang dibahas oleh pemerhati ekonomi dan masyarakat sebagai indeks gagalnya birokrasi. Faktor penyebab kurang maksimal kinerja pemerintah daerah yang sudah ditargetkan adalah rendahnya penyerapan anggaran. Anggaran tidak terserap secara maksimal dapat menyebabkan berkurangnya nilai manfaat belanja, dikarenakan pemerintah tidak menggunakan seluruh dana yang dialokasikan atau terdapat dana yang menganggur.

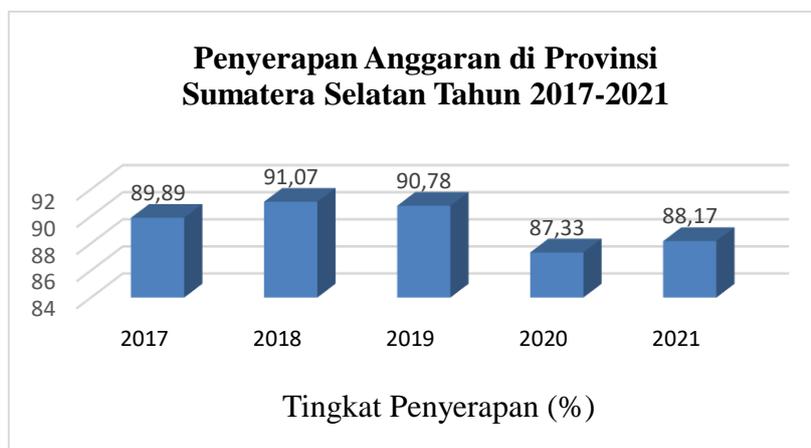
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan satu diantaranya mengalami kesulitan merealisasi belanja yang belum mencapai target. Realisasi belanja daerah di Sumatera Selatan masih relatif rendah. Dalam Media Indonesia (2021), Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerangkan bahwa alasan terlambatnya penyerapan anggaran di beberapa wilayah terjadi dikarenakan keterlambatan dari proses tender. Untuk itu, setiap daerah harus segera memaksimalkan serapan anggaran diwaktu yang tersisa. Hingga September 2021, tingkat realisasi belanja pemerintah tergolong dibawah 50%.

Menurut informasi dari data Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dalam Media Indonesia (2021), terdapat delapan daerah yang tingkat realisasi belanja yang masih dibawah 50%. Daerah-daerah tersebut antara lain, Kota Palembang dengan tingkat realisasi belanja sebesar 49,19% dan Lubuk Linggau dengan tingkat realisasi belanja sebesar 41,38%. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang dengan tingkat realisasi belanja sebesar 46,15%, Pali dengan tingkat realisasi belanja sebesar 45,60%, Banyuasin dengan tingkat realisasi belanja sebesar 45,56%, Lahat dengan tingkat realisasi belanja sebesar 43,94%, Ogan Ilir dengan tingkat realisasi belanja sebesar 43,54% dan yang paling rendah Musi Rawas Utara dengan tingkat realisasi belanja sebesar 37,74%.

Sementara penggunaan anggaran belanja tertinggi dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 78,69%. Disusul Kabupaten OKU Selatan dengan tingkat realisasi belanja

sebesar 60,61%, OKU Timur dengan tingkat realisasi belanja sebesar 55,88%, Musi Rawas dengan tingkat realisasi belanja sebesar 55,53%, Kota Pagaralam dengan tingkat realisasi belanja sebesar 52,11%, OKU dengan tingkat realisasi belanja sebesar 51,05%, Muara Enim 51%, OKI dengan tingkat realisasi belanja sebesar 50,92%. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan relatif tinggi dibanding dengan realisasi belanja. Total penerimannya mendekati Rp25,3 T. Sedangkan, jumlah pengeluaran belanja hanya Rp21,59 T. Dapat disimpulkan bahwa dana tersimpan di kas daerah yang masih banyak yang belum dialokasikan. Pemerintah harus lebih memperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar APBD dapat bergerak cepat dalam situasi pertumbuhan yang melambat (Anggi dkk. 2019).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan satu diantara pemerintahan yang mempunyai tingkat penyerapan anggaran belanja tergolong rendah, dimana serapan anggaran pada Provinsi Sumatera Selatan fluktuasi dengan rata-rata 89,45% (Kemendagri, 2021). Keadaan tersebut dapat diperlihatkan pada grafik berikut:



Gambar 1. Tingkat Penyerapan Anggaran

Sumber: LKPD Sumatera Selatan, diolah peneliti (2023)

Menurut PMK No. 158, bahwa kinerja anggaran dikatakan baik jika kementerian/lembaga negara mempunyai tingkat serapan anggaran setidaknya 95%. Provinsi Sumatera Selatan memiliki rata-rata sebesar 89,45%. Dampak dari rendahnya penggunaan anggaran akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Penyerapan anggaran yang rendah justru dinilai sebagai hal kurang baik, karena memberi kesan adanya kekurangan dalam perencanaan anggaran seperti peningkatan belanja dari belanja wajarnya atau mungkin banyaknya program yang tidak dilaksanakan.

Pemerintah daerah menyusun anggaran belanja setelah mencari tahu dari mana sumber pendanaannya. Besaran pendapatan akan mempengaruhi besaran alokasi belanja termasuk didalamnya belanja modal. Saat menggunakan belanja modal, pemerintah harus dapat mengelola agar diserap dengan baik. Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah, belanja modal memiliki peran yang penting sebagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam penelitian Kurniawan (2012), belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat serapan anggaran hingga triwulan III tahun 2011 di Satker KPPN Malang.

Penyerapan anggaran terkait belanja jasa maupun barang adalah sebuah cara untuk menghidupkan ekonomi bangsa. Pengelolaan barang ataupun jasa menjadi penting dikarenakan akan berpengaruh terhadap efisiensi dan aktivitas terhadap penyelenggaraan pembangunan dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. Pembangunan diartikan dalam berbagai program, proyek dan kebijakan. Proyek termasuk aktivitas pengadaan barang dan jasa yang mana proses dan sistem pengelolaannya secara langsung dan signifikan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembangunan (Siregar, 2008). Dalam penelitian yang dilakukan Ratag dkk. (2019) menjelaskan belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan pada penyerapan anggaran pada lingkungan Universitas Sam Ratulangi.

Demikian juga dengan belanja tak terduga, dimana penggunaan APBD di berbagai wilayah mempunyai tingkat perimbangan yang berbeda tergantung prioritas di setiap daerah. Dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga mengharuskan Sumatera Selatan menyesuaikan APBD, anggaran pengeluaran yang tak terduga menjadi topik menarik untuk dibahas dikarenakan alokasi anggaran sering kali digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan seperti kebutuhan mendesak yang tak terduga akibat dari Covid-19 atau bencana tak terduga lainnya (Aprilia, 2022).

Berdasarkan fenomena penyerapan anggaran pemerintah daerah khususnya yang terjadi di Indonesia. Peneliti terdorong untuk meneliti Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

KAJIAN TEORITIK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan acuan UU Republik Indonesia Nomor 1 Thn. 2022, APBD ialah dasar mengelola keuangan daerah dengan jangka waktu satu tahun anggaran berdasarkan undang-undang terkait keuangan negara. Setiap tahunnya menteri menetapkan panduan menyusun APBD setelah berkoordinasi dengan menteri melaksanakan terkait penyelenggaraan urusan keuangan.

APBD merupakan anggaran keuangan daerah disusun sesuai peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana penerimaan dan belanja daerah. Seperti halnya pendapatan negara, pendapatan daerah ditunjukkan setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk dibahas dan akan dipatenkan sebagai peraturan. APBD diatur untuk landasan bagi pengeluaran dan penerimaan dalam penyelenggaraan negara di tiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD bisa digunakan untuk penghubung pemerintah daerah untuk masyarakat terkait yang utama untuk peletakkan oleh pemerintah daerah setelah berhubungan dengan pihak legislatif.

Penyerapan Anggaran

Menurut Ramadhani (2017), "Penyerapan anggaran menunjukkan kesanggupan pemerintah dalam mencatat serta melaksanakan aktivitas yang diperoleh dari penggunaan anggaran pemerintah daerah. Penggunaan anggaran rendah tidak". Rendahnya penggunaan anggaran bukan berarti salah satu indikator dalam menilai kesuksesan finansial pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus memberi penglihatan untuk permasalahan ini. Jika permasalahan dapat terjadi secara terus menerus, bisa dipastikan jika tujuan kinerja yang sudah ditentukan tidak bisa dicapai.

Belanja Modal

Dalam PMK No. 102 Tahun 2018 terkait Klasifikasi Anggaran, "Belanja modal ialah pengeluaran dalam meningkatkan jumlah aset tetap ataupun aset lain dengan jangka waktu melebihi satu tahun anggaran, ketentuan pendanaan aset tetap ataupun aset yang ditentukan oleh pemerintah". Aset tetap dipakai sebagai aktivitas sehari-hari pada unit kerja yang digunakan masyarakat serta tercatat dalam registrasi aset Kementerian atau Lembaga dan tujuannya bukan untuk dijual. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, belanja bangunan dan gedung, irigasi, jalan dan jaringan, belanja aset lainnya.

Belanja Barang dan Jasa

Menurut Peraturan No. 12 Tahun 2019, “Belanja barang dan jasa untuk menganggarkan terkait barang/jasa dengan masa penggunaannya kurang dari satu tahun, seperti barang/jasa yang nantinya di serahkan untuk kepentingan publik.

Kegiatan dalam rangka perolehan barang dan jasa dari instansi/lembaga, prosesnya dari perencanaan kebutuhan hingga terselesainya semua kegiatan yang berkaitan dengan barang dan jasa (Astuty, 2022).

Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga yaitu pengeluaran anggaran dengan tujuan dalam aktivitas yang diharapkan kejadiannya tak akan terulang, seperti bencana sosial, penanggulangan bencana alam serta biaya tak terduga lain yang dibutuhkan agar terselenggaranya kekuasaan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah (djpk.kemenkeu.go.id).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, “Belanja tak terduga merupakan belanja dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kebutuhan/keadaan penting termasuk kebutuhan darurat yang tidak tau kapan pengembalian lebih bayar atas penerimaan dari tahun sebelumnya”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan dua jenis variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian kuantitatif pada penelitian ini bertujuan memberikan gambaran besarnya pengaruh Belanja Modal, Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021.

Dalam mendapatkan data di penulisan skripsi ini, penulis melakukan kajian penelitian pada 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021. Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2023 hingga bulan Juli 2023.

Variabel penelitian merupakan segala yang ditentukan dalam bentuk apapun, ditentukan dalam suatu penelitian dengan demikian rupa untuk memperoleh informasi tentang subjek dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini

memiliki 3 (tiga) variabel bebas (X) yaitu Belanja Modal (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja Tak Terduga (X3). Dan 1 variabel terikat yakni Penyerapan Anggaran (Y).

Berikut ini tabel 1. terkait definisi operasional dan skala pengukuran penelitian:

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
Penyerapan Anggaran (Y)	Penyerapan anggaran merupakan seluruh pengeluaran belanja atau kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi anggaran belanja berdasarkan alokasi yang ditetapkan di dalam APBD	$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Modal (X1)	Belanja modal merupakan pengeluaran untuk menambah aset tetap maupun aset lainnya yang diperoleh masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dengan batas minimum yang ditentukan pemerintah untuk aset tetap maupun aset lainnya	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Barang dan Jasa (X2)	Belanja barang maupun jasa ialah pengeluaran yang timbul dari belanja yang sifatnya habis pakai tujuannya sebagai produksi barang/jasa yang diperdagangkan ataupun	$\frac{\text{Realisasi Belanja Barang dan Jasa}}{\text{Anggaran Belanja Barang dan Jasa}} \times 100\%$	Rasio

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
	tak diperdagangkan serta penyediaan barang yang ditujukan bagi pengiriman ke masyarakat maupun pemerintah daerah		
Belanja Tak Terduga (X3)	Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kebutuhan darurat yang sifatnya mendesak dan tidak dapat diperkirakan kejadiannya	$\frac{\text{Realisasi Belanja Tak Terduga}}{\text{Anggaran Belanja Tak Terduga}} \times 100\%$	Rasio

Populasi adalah bagian umum yang terdiri atas subjek/objek dengan ciri-ciri karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti agar di pelajari, kemudia ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Sebanyak 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai pada penelitian yang dilaksanakan.

Sampel adalah bagian dari total serta karakteristik yang ada dimiliki populasi. Pengukuran sampel penelitian yang dilakukan ditentukan dengan sampling jenuh, dimana keseluruhan dari anggota populasi digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Hingga sampel dipenelitian ini adalah 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada penelitian yang dijalankan, pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder berbentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang didapat dari laman resmi BPK RI melalui <https://e-ppid.bpk.go.id> untuk mendapatkan laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai gambaran dari kumpulan, pengolah, penyajian dan menganalisis secara deskriptif data kuantitatif. Hasil analisis statistik deskriptif nantinya

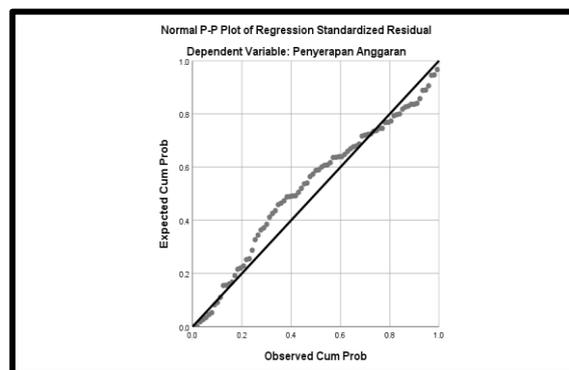
memberi cerminan secara umum dari ciri data yang di olah contohnya nilai standar deviasi, mean, maksimum, minimum, dll. Nilai ini bermanfaat dalam menggambarkan terkait variabel yang diteliti sehingga dapat menjelaskan besaran data yang ada. Hasil analisis statistik pada penelitian ini dapat dijelaskan secara ringkas pada tabel 2

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	85	50.88	124.86	88.2407	10.75463
Belanja Barang dan Jasa	85	69.46	100.16	89.5659	5.41071
Belanja Tak Terduga	85	.00	99.85	32.0681	30.34608
Penyerapan Anggaran	85	73.83	100.93	89.3668	4.86796
Valid N (listwise)	85				

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam menggambarkan apakah pada model regresi, variabel residual atau pengganggu berdistribusi dengan normal. Pada penelitian yang dijalankan memakai *Normal P-P Plot* dan *K-S Test* menggunakan pendekatan *exact*. Penelitian ini diperoleh hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar, diketahui setiap titik mengikuti garis diagonal serta terdistribusi disekitar garis, jadi data yang tersedia dapat dipakai dalam statistik dikarenakan nilai residualnya telah normal.

Selain pengujian normalitas dengan *P-Plot*, dapat dilakukan *K-S Test*. Hasil dari uji normalitas variabel di penelitian ini bisa terlihat dalam tabel 3. berikut:

Tabel 3. Uji Normalitas *K-S test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		85
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation ^b	2.32243303
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.074
	Negative	-.117
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.006 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.181
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas didapat dalam *K-S Test* dengan pendekatan exact menunjukkan nilai signifikansi *Exact Sig. (2-tailed)* ialah senilai 0.181. Dapat disimpulkan $0.181 > 0,05$ berarti seluruh data dari variabel penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan melihat apakah terdapat korelasi pada model regresi linear diantara kesalahan pengganggu dalam periode berjalan dan periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian yang dilaksanakan melalui uji Durbin-Watson (*DW test*).

Dalam pengujian autokorelasi dengan Durbin-Watson, dapat dikatakan nilai residual tidak saling berkorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson ditunjukkan pada tabel 4. berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879 ^a	.772	.764	2.36505	1.711

a. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tabel 4. dengan uji Durbin-Watson didapatkan nilai DW 1.711. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.711 terletak diantara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Dikatakan model regresi yang baik apabila nilai regresnya tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas berguna untuk melihat apakah terjadi korelasi antar variabel bebas di model regresi. Salah satu cara untuk menentukan hal tersebut, dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF yang dihasilkan oleh variabel bebas.

Jika *tolerance* lebih besar dari 0,10 serta VIF lebih kecil dari 10, jadi tak ada multikolonieritas. Hasil pengujian pada multikolonieritas dipenelitian yang dijalankan bisa terlihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Belanja Modal	.848	1.180
Belanja Barang dan Jasa	.842	1.188
Belanja Tak Terduga	.992	1.009

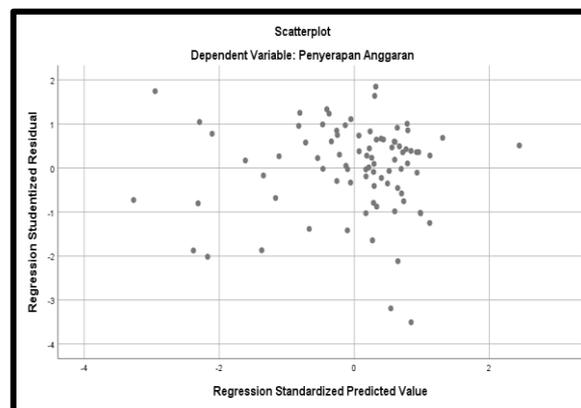
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Dari hasil pengujian diatas menunjukkan variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan memeriksa model regresi terdapat perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Untuk mengetahui terjadinya heterokedastisitas pola pada *scatterplot* dibawah ini.

1. Jika adanya pola tertentu, titik-titik yang berbentuk pola beraturan maka terjadinya heterokedastisitas.
2. Jika polanya tidak ada yang jelas, titik-titik pada sumbu Y menyebar dibawah dan diatas angka 0, hal ini tidak terjadinya heterokedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas *Scatterplot*

Dari gambar di atas, menunjukkan uji heterokedastisitas tidak adanya pola yang jelas, titik-titik menyebar dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas.

Analisis grafik plot mempunyai kelemahan yaitu total pengamatan berpengaruh terhadap hasil *ploting*. Makin dikit pengamatan maka akan makin susah untuk menjabarkan hasil dari grafik plot. Dengan demikian, dibutuhkan pengujian statistik lain secara lebih tepat untuk memperoleh hasil yang jelas.

Berikut merupakan hasil pengujian pada *Glejser* untuk meningkatkan keakuratan pengujian heterokedastisitas model regresi. Uji *Glejser* dalam melakukan regres nilai absolut residual pada variabel bebas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji *Glejser*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.229	2.785		1.877	.064
	Belanja Modal	-.013	.017	-.091	-.765	.446
	Belanja Barang dan Jasa	-.024	.033	-.085	-.712	.478
	Belanja Tak Terduga	-.007	.005	-.147	-1.343	.183

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel, diperoleh hasil menggunakan uji *Glejser* residual bahwa tidak adanya variabel bebas yang signifikan secara statistik terhadap variabel terikat nilai Absolut Residual. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan probabilitas signifikasinya yang lebih besar dari tingkat kepercayaan 5%. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *Glejser* menunjukkan nilai korelasi dari ketiga variabel bebas dan variabel terikat berada di atas 0,05 dengan nilai signifikansi yaitu. $X_1 = 0,446 > 0,05$, $X_2 = 0,478 > 0,05$ dan $X_3 = 0,183 > 0,05$. Maka ditarik kesimpulan jika tak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dikarenakan signifikansi $> 0,05$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda yang tujuannya mengetahui arah dan sebesar apa pengaruh variabel belanja modal, barang serta jasa, dan belanja tak terduga terhadap variabel serapan anggaran. Pada penelitian yang dijalankan diperoleh hasil analisis regresi linear bergandanya ditabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.685	4.359		6.581	.000
	Belanja Modal	.273	.026	.603	10.479	.000

Belanja Barang dan Jasa	.403	.052	.448	7.761	.000
Belanja Tak Terduga	.014	.009	.088	1.656	.102

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Didasari dari hasil Tabel 7. dalam penelitian ini dapat diperoleh rumus persamaannya pada regresi linear berganda, adalah:

$$Y = 28,685 + 0,273X1 + 0,403X2 + 0,014X3 + e$$

Ditinjau dari rumus persamaan diatas bisa dijabarkan:

- Konstanta (a) = 28,685 memperlihatkan nilai konstan, yang mana apabila nilai variable bebas ialah nol, jadi variabel Y (penyerapan anggaran) = 28,685.
- Koefisien X1 (b1) = 0,273 yang memperlihatkan variable Belanja Modal (X1) berpengaruh dengan positif pada variable Y (penyerapan anggaran). Berarti apabila variabel lainnya bernilai tetap serta varibel Belanja Modal di tingkatkan satu-satuannya jadi penyerapan anggaran dapat meningkat 0,273.
- Koefisien X2 (b2) = 0,403, memperlihatkan apabila variable Belanja Barang dan Jasa (X2) berpengaruh dengan positif pada variabel Y (penyerapan anggaran). Yang mengartikan jika variabel lain nilainya tetap dan varibel Belanja Barang maupun Jasa di tingkatkan satu-satuannya jadi serapan anggaran akan naik 0,403.
- Koefisien X3 (b3) = 0,014, memperlihatkan jika variable Belanja Tak Terduga (X3) berpengaruh dengan positif pada variabel Y (penyerapan anggaran). Itu mengartikan bahwa variabel lainnya yang bernilai tetap serta varibel Belanja Tak Terduga di tingkatkan satu-satuannya jadi penyerapan anggaran akan naik 0,014.
- Standar error (e) yang memperlihatkan tingkatan kesalahan yang mengganggu.

Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi bertujuan mengukur besarnya hubungan linear dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Koefisien korelasi (R) memiliki nilai antara -1.00 sampai dengan +1.00. Hasil uji koefisien korelasi diliat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Hasil Koefisien korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879 ^a	.772	.764	2.36505	1.711

a. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel model di atas didapat nilai koefisien R senilai 0.879, nilai tersebut berada diantara -1.00 sampai dengan +1.00. Artinya hubungan/korelasi variabel Belanja Modal (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), serta Belanja Tak Terduga (X3) mempunyai hubungan yang relatif kuat sebesar 87,9%. Sedangkan nilai *R Square* yang didapat senilai 0,772 ataupun 77,2%. Hal itu menunjukkan Belanja Modal (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja Tak Terduga (X3) dengan bersamaan berpengaruh dengan besaran 77,2% terhadap Penyerapan Anggaran (Y) sementara selebihnya 22,8% terpengaruh dari variable lainnya yang tidak termasuk di penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) secara umum untuk menilai sejauh mana kemampuan model mampu menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien determinan merupakan angka yang menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh yang di berikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi bernilai diantara nol dan satu. Hasil yang diperoleh bisa terlihat dalam tabel 9 dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Koefisien korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879 ^a	.772	.764	2.36505	1.711

a. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,764 dan dalam persen 76,4% variabel bebas mampu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yakni serapan anggaran. Sementara selebihnya sebesar 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Hipotesis

Hipotesis pada penelitian yang dijalankan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Pengujian dalam hipotesis terdiri dari uji statistik t dan uji statistik F.

Uji Statistik t

Uji statistik t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individu menjelaskan variasi dari variabel terikat. Kriteria uji statistik t antara lain:

1. Tolak H_0 serta terima H_a apabila nilai $sig < 0,05$ berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan pada variabel terikat secara individu.
2. Terima H_0 serta tolak H_a apabila nilai $sig > 0,05$ mengartikan jika variabel bebas tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap variabel terikat secara individu.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	28.685	4.359		6.581	.000
	Belanja Modal	.273	.026	.603	10.479	.000
	Belanja Barang dan Jasa	.403	.052	.448	7.761	.000
	Belanja Tak Terduga	.014	.009	.088	1.656	.102

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel 9 hasil uji statistik t menyatakan belanja modal, belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan belanja tak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

1. Nilai signifikannya pada variable Belanja Modal senilai $0,000 < 0,05$. Hasil itu membuktikan belanja modal memiliki pengaruh signifikan pada penyerapan anggaran.

Koefisien beta *unstandardized coefficient* variabel belanja modal bernilai positif yakni 0,273 artinya belanja modal berpengaruh dengan positif pada penyerapan anggaran.

2. Nilai signifikan variabel Belanja Barang dan Jasa sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini membuktikan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Koefisien beta *unstandardized coefficient* variabel belanja barang dan jasa memiliki nilai positif yaitu 0,403 yang artinya belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif pada serapan anggaran.
3. Nilai signifikannya pada variable Belanja Tak Terduga senilai $0,102 > 0,05$. Hasil ini membuktikan belanja tak terduga tak mempunyai pengaruh dengan signifikan pada serapan anggaran. Koefisien beta *unstandardized coefficient* variabel belanja tak terduga memiliki nilai positif yaitu 0,014 yang artinya belanja tak terduga memiliki pengaruh positif dengan penyerapan anggaran.

Uji Statistik F

Uji statistik F dalam mengetahui apakah dengan bersamaan (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh pada variabel terikat. Pengujian statistik F memiliki kriteria berikut:

1. H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai sig $< 0,05$ berarti suatu variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai sig $> 0,05$ berarti suatu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1537.483	3	512.494	91.624	.000 ^b
	Residual	453.070	81	5.593		
	Total	1990.554	84			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan dari tabel 10. didapat hasil uji statistik F senilai 91.624 dan Sig senilai $0,000 < 0,05$. Maka bisa disimpulkan jika model regresi yang digunakan belanja modal, barang

serta belanja jasa, belanja tak terduga dengan bersamaan (simultan) mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal

Hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Tingkat signifikansi variabel belanja modal 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Dari hasil tersebut **H1 diterima**. Hal tersebut menunjukkan belanja modal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan mempunyai arah pengaruhnya positif ($\beta = 0,273$) dengan thitung 10,479. Dimana dalam penelitian ini, nilai thitung 10,479 lebih besar dari ttabel 1,664. Artinya belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mempengaruhi penyerapan anggaran.

Belanja modal ialah belanja yang dikeluarkan dan bernilai manfaat lebih dari satu tahun, membuat peningkatan sumber kekayaan daerah, serta pula membuat peningkatan pada biaya untuk pemeliharaan rutin seperti biaya pemeliharaan operasional. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai macam kegiatan proyek. Keterlambatan pelaksanaan proyek merupakan faktor penting yang menyebabkan penyerapan belanja modal berjalan lambat dan tidak berfungsi secara optimal. Semakin tinggi nilai belanja modal jadi tingkatan serapan anggaran makin tinggi pula.

Penelitian ini menunjukkan hasil belanja modal berpengaruh dengan positif signifikan pada serapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dijalankan menerangkan belanja modal berpengaruh dengan positif signifikan pada serapan anggaran didasari dari Laporan Keuangan Pemerintah di Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika belanja modal terealisasi secara maksimal maka penyerapan anggaran juga turut meningkat. Hal tersebut selaras seperti penelitian yang dijalankan oleh Kurniawan (2012) yang menyebutkan jika belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa

Hipotesis kedua pada penelitian yang dijalankan yaitu Belanja Barang dan Jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Tingkat signifikansi variabel belanja barang serta jasa 0,000 < tingkat signifikansinya 0,05. Dari hasil tersebut **H2 diterima**. Hal tersebut menunjukkan belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan arah pengaruh positif ($\beta = 0,403$) dengan nilai thitung 7,761.

Dimana dalam penelitian ini, nilai thitung 7,761 lebih besar dari ttabel 1,664. Hal ini berarti belanja barang dan jasa pada laporan keuangan pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mempengaruhi penyerapan anggaran.

Belanja barang dan jasa adalah biaya perolehan barang dan jasa konsumen dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat dipasarkan atau tidak dapat dipasarkan, serta biaya perolehan dan perjalanan untuk barang yang dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai belanja barang dan jasa jadi makin tinggi serapan anggarannya.

Penelitian ini menunjukkan hasil belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dari hasil penelitian diketahui belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran dilihat berdasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut menjelaskan ketika belanja barang dan jasa terealisasi secara maksimal maka serapan anggarannya juga turut meningkat. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian dilakukan Bitu (2021) pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Belanja Tak Terduga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu Belanja Tak Terduga berpengaruh signifikan terhadap penyerapan. Tingkat signifikansi variabel belanja tak terduga 0,102 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Dari hasil tersebut diperoleh **H3 ditolak**. Hal ini menjelaskan belanja tak terduga tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki pengaruh positif ($\beta = 0,014$) dengan nilai thitung 1,656. Dimana dalam penelitian ini, nilai thitung 1,656 lebih kecil dari ttabel 1,664. Artinya belanja tak terduga pada laporan keuangan pemerintah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan tidak mempengaruhi serapan anggarannya.

Secara teoritis, belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan sebagai aktivitas yang tidak biasa, sifatnya diharapkan tak terulang contohnya penanganan bencana alam serta pengeluaran tak terduga lain yang sifatnya begitu dibutuhkan untuk pelaksanaan wewenang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga dibebankan APBD dalam keadaan darurat dan penggantian kelebihan bayar terkait pendapatan daerah di tahun sebelumnya. Dengan adanya kejadian tak terduga,

harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi penyerapan belanja daerah di Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini menjelaskan belanja tak terduga tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Banyak faktor yang menyebabkan belanja tak terduga tidak mempunyai pengaruh pada tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, salah satunya dikarenakan sifat dari belanja tak terduga yang kondisional sehingga menyebabkan tidak stabil disetiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa belanja tak terduga tidak mempunyai pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dikarenakan belanja tak terduga yang sudah direalisasikan dalam satu tahun anggaran belum sesuai target awal dan pagu anggaran yang sudah ditetapkan sehingga tidak terserap secara maksimal.

Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga

Hipotesis keempat dari penelitian ini Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Tingkat signifikansi variabel 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Dengan hasil tersebut **H4 diterima**. Berdasarkan hasil Uji statistik F, nilai Fhitung adalah 91,624 lebih besar dari Ftabel 2,72. Sehingga dapat dinyatakan Belanja Modal (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja Tak Terduga (X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat Penyerapan Anggaran (Y). Namun, secara parsial variabel belanja tak terduga dinyatakan tidak berpengaruh. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini harus dipenuhi secara bersama-sama, karena jika hanya salah satu yang dilaksanakan maka tidak akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

KESIMPULAN

Ditinjau dari hasil penelitian yang sudah dijalankan bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Belanja Modal memiliki pengaruh secara signifikan pada Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Belanja Tak Terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Belanja Belanja Modal, Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*. 14(1), 1-18
- Anggi., Toyib. M., Fithri. (2022). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Journal Transformation of Mandalika*. 2(3), 5-11.
- Apriani, Dwi. (2021). Realisasi Belanja Pemerintah daerah di Sumatera Selatan Masih Rendah. Media Indonesia. Dari link website: <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/449239/realisasi-belanja-pemda-di-sumsel-masih-rendah>. Diakses 16 Februari 2023.
- Aprilia, E.A & Ma'ruf, M.F. (2022). Pengaruh Belanja Tidak Terduga Terhadap Defisit Keuangan Daerah Periode APBD 2019-2020 di Kabupaten Trenggalek. *Publika*. 10(2), 595-608.
- Astuty, Selvia. (2022). Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. 8(3), 475-487.
- Bitu, Sitti Hafsa Sara. (2021). *Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Langsung di masa Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif, Imam., & Suparno. (2017). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan *Fiscal Stress* Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 2(4), 107-155.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*.
- Idrus, Ilham. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Negara pada Kementerian dan Lembaga. *Research Gate*. Februari 2013.
- Kemendagri. (2021). *Serapan Anggaran Rendah, Pusat Terjunkan Tim Asistensi ke Tujuh Provinsi*. <https://www.idxchannel.com/economics/serapan-anggaran-rendah-pusat-terjunkan-tim-asistensi-ke-tujuh-provinsi>
- Kuncoro, Egiastyo Dwi. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional WIL. I DINAS PU PROV. KALTIM. *eJournal Administrasi Bisnis*. 1(4), 364-373.

- Kurniawan, Fauzi. (2012). *Pengaruh Jumlah Belanja Modal dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Malang*. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Narafin, Muhammad. (2013). *Penganggaran Perusahaan, Edisi ketiga*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Nurkholis, Moh. Khusaini. (2019). *Penganggaran Sektor Publik. Universitas Brawijaya Press*. Malang: Tim UB Press.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Ramadhani, R. & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(2), Seri B, 710-726.
- Ramadhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*.10, 134 – 147.
- Ratag, W.A dkk. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 20(3), 78-91.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Santoso, Singgih. (2019), *Mahir Statistik Parametrik: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.